

UPAYA EKSTERNAL INDIA DALAM MENANGANI BANJIR DI KERALA TAHUN 2018

Pertiwi Agustina¹

Abstract: *The flood in Kerala in 2018 emerged as a calamitous event precipitated by the natural phenomenon of the monsoon rainstorm. Compounded by inadequate flood management by the Indian government, the repercussions were magnified, resulting in extensive damage and losses in the region. The purpose of this research is to explain the India's external efforts in addressing the floods that occurred in Kerala in the year 2018. The type of research used is descriptive with qualitative analysis technique. The data sources obtained include secondary data from books, theses, journals, reports from the World Health Organization (WHO), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), National Institute of Disaster Management (NIDM), and National Disaster Management Authority (NDMA) of the Government of India. Additionally, official websites related to the researched issue were utilized. Initially, the Indian government endeavored to address the flood through various domestic measures. However, due to the high number of casualties and the vast geographical area affected, the government eventually found itself overwhelmed, unable to optimally resolve the crisis. Consequently, employing humanitarian diplomacy theory, the Indian government pursued alternative efforts by employing persuasive strategies on the international stage, urging global collaboration to effectively address the flood response in Kerala.*

Keywords: *Floods, Kerala, External Efforts by India.*

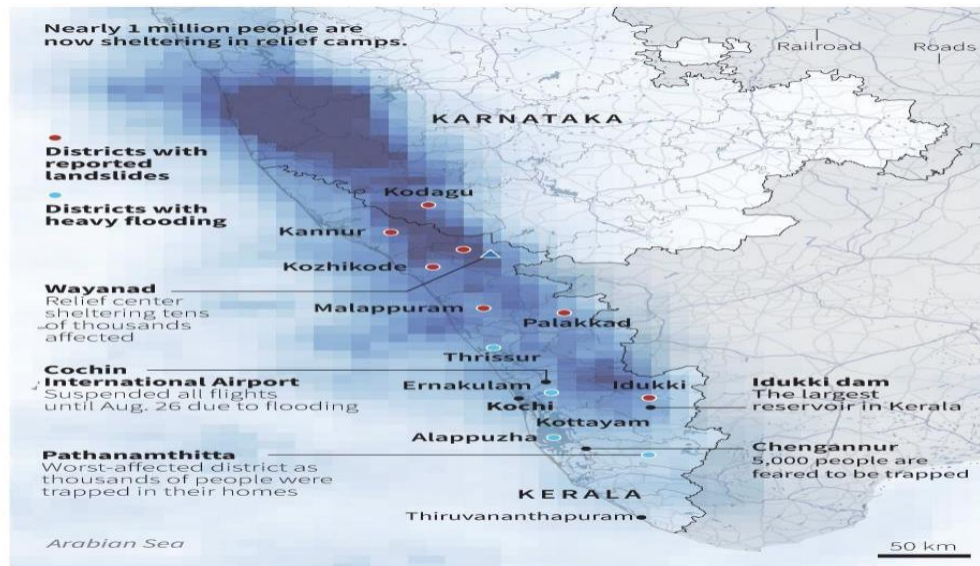
Pendahuluan

Fenomena alam musim hujan muson adalah musim hujan tahunan yang terjadi pada bulan Juni hingga bulan Desember disebabkan oleh meluapnya Samudera Hindia karena suhu yang naik dengan cepat akibat adanya musim panas di kawasan Asia (Government of India, 2019). Dampak musim hujan muson sangat parah bagi negara-negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Timur. Hal ini menyebabkan beberapa negara mengalami bencana alam, mulai dari hujan deras, banjir, tanah longsor, dan badai. India menjadi negara yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang parah akibat dampak dari musim hujan muson yang terjadi pada tahun 2018 (NIDM, 2018).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri India menyatakan bahwa ada 5 negara bagian yang mengalami banjir akibat dampak dari musim hujan muson, antara lain adalah Kerala, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka, dan Assam (Government of India, 2018). Ada 14 wilayah di Kerala yang mengalami banjir, yaitu Kodagu, Kannur, Kozhhide, Malappuram, Palakkad, Idduki, Wayanad, Thrissur, Ernakulam, Kottayam, Alappuzha, Chengannur, dan Pathanamthitta. Selain itu, dampak dari musim hujan muson juga memicu adanya tanah longsor yang terjadi di 6 wilayah Kerala, yaitu Kodagu, Kannur, Kozhhide, Malappuram, Palakkad, dan Idduki (Reuters, 2018).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : pertiwiag@gmail.com.

Gambar 1. Peta Persebaran Banjir dan Tanah Longsor di Kerala Tahun 2018



Sumber : Reuters

Kerala menjadi wilayah yang terkena dampak paling parah. Total 5,4 juta penduduk terkena dampak dan diantaranya 399 orang meninggal dan 1.4 juta orang menjadi pengungsi (UNDP, 2018). Selain itu, kerusakan infrastruktur milik penduduk dan Pemerintah diperkirakan mencapai total kerugian sebesar US\$ 4.4 Miliar, lebih besar dari jumlah kerugian yang dialami oleh wilayah lainnya. Hal ini menjadikan banjir yang terjadi di Kerala pada tahun 2018 sebagai banjir terburuk yang pernah dialami India dalam hampir satu abad sehingga memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah pusat agar dampak buruk dari bencana yang terjadi tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan yang lebih besar (Government of Kerala, 2018).

Melihat besarnya wilayah yang mengalami bencana dan banyaknya kerugian yang dirasakan, diperlukan upaya penanganan untuk mencegah bertambahnya korban dan kerusakan selama bencana terjadi. Terkait dengan strategi dalam menghadapi bencana, upaya yang dilakukan Pemerintah India adalah menerapkan Rencana Penanganan Bencana Nasional atau *National Disaster Management Plan* (NDMP) 2016. Dalam NDMP, terdapat 3 tahapan upaya yang telah dirancang, yaitu upaya sebelum banjir dengan memantau curah hujan dan memperhatikan peringatan cuaca yang dikeluarkan oleh India Meteorological Department (IMD). IMD adalah lembaga milik Pemerintah India yang bertanggung jawab dalam memantau cuaca, iklim, dan fenomena alam lainnya di India. Selain itu, Pemerintah India bekerja sama dengan Pemerintah Kerala mengirimkan pesan peringatan melalui media sosial dan SMS. Pesan tersebut memberikan informasi tentang risiko banjir dan tanah longsor, serta memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil untuk mengurangi dampaknya (NIDM, 2020).

Upaya kedua saat banjir terjadi yaitu dengan menempatkan pasukan khusus untuk melakukan tindakan cepat dalam penanganan bencana agar dapat meminimalisir kerusakan yang timbul akibat bencana yang terjadi seperti melakukan operasi penyelamatan korban bencana serta tindakan lainnya yang berkaitan dengan

penanganan situasi bencana seperti National Disaster Response Force (NDRF) dan Indian Army (NDRF, 2018).

Setelah banjir, Pemerintah India yang bekerja sama dengan NDRF dan Indian Army tetap dilakukan, dalam proses ini pula pengkajian dampak dan kerugian yang diakibatkan banjir dikaji secara mendalam. Dan ternyata masih banyak dampak yang diakibatkan oleh banjir belum dapat dilakukan secara optimal menggunakan upaya domestik. Hal ini dikarenakan banyaknya kerusakan infrastruktur, kerugian material, korban evakuasi, dan dampak lain yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah India sendiri. Selain itu, dalam proses ini diperlukan evaluasi pembelajaran yang bisa diambil dari banjir yang telah terjadi dan strategi yang bertujuan untuk mengurangi risiko serta dampak negatif yang disebabkan oleh banjir di masa depan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam mengatasi banjir di Kerala masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kekurangan tersebut:

1. Keterbatasan dalam mencapai desa-desa terisolasi: Medan yang hancur akibat bencana banjir membuat akses ke desa-desa terisolasi menjadi sulit. Hal ini menyulitkan proses evakuasi dan penyediaan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Tantangan evakuasi korban: Pemerintah India menghadapi tantangan dalam evakuasi korban banjir. Jumlah korban yang harus dievakuasi cukup banyak, dan medan yang sulit membuat proses evakuasi menjadi lebih rumit.

3. Kerugian yang signifikan: Banjir di Kerala telah menyebabkan kerugian yang besar, baik dalam hal kerusakan infrastruktur maupun kehilangan harta benda. Pemerintah India perlu menghadapi beban finansial yang besar untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-banjir.

4. Keterbatasan anggaran: Meskipun Pemerintah India telah memberikan bantuan finansial kepada Pemerintah Kerala, jumlahnya masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya. Permintaan dana bantuan yang lebih besar dari Pemerintah Kerala belum dapat dipenuhi sepenuhnya.

5. Tantangan dalam penanganan banjir di negara bagian lain: Selain Kerala, beberapa negara bagian lain di India juga mengalami banjir akibat musim hujan muson. Pemerintah India perlu mengalokasikan sumber daya dan upaya untuk menangani banjir di berbagai wilayah tersebut.

Kekurangan-kekurangan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India masih memiliki ruang untuk ditingkatkan dalam mengatasi banjir di Kerala. Oleh karena itu, Pemerintah perlu membuka diri dan menerima bantuan kemanusiaan dari pihak luar. Selain itu, hubungan diplomatis dengan negara-negara lain dan organisasi internasional juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Selain itu, Pemerintah India juga memberikan bantuan finansial sebesar US\$ 72 Juta kepada Pemerintah Kerala untuk membantu dalam pemulihan pasca banjir. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan membantu korban yang kehilangan rumah dan harta benda. Namun, nominal dana bantuan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan dana yang diminta oleh Pemerintah Kerala yaitu sebesar US\$ 264 Juta (CNN, 2018).

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah India dalam menangani banjir di Kerala, namun karena luasnya wilayah dan banyaknya korban yang terdampak menyebabkan penanganan secara internal belum berhasil terlaksana secara optimal. Sehingga, Pemerintah India memerlukan upaya eksternal, yaitu dengan membuka diri

terhadap masyarakat internasional yang ingin memberikan bantuan dan melakukan langkah persuasif dengan meminta bantuan dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam menangani bencana agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya eksternal dari Pemerintah India dalam menangani banjir di Kerala tahun 2018.

Kerangka Teori

Teori Diplomasi Kemanusiaan

Dalam definisinya, diplomasi kemanusiaan adalah upaya diplomatik yang dilakukan untuk membujuk para pemimpin dan pembuat keputusan agar melindungi hak asasi manusia, memperjuangkan perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan, dan memperbaiki kondisi kemanusiaan secara keseluruhan (IFRC, 2017).

Tujuan utama diplomasi kemanusiaan adalah untuk mengurangi penderitaan manusia, melindungi hak-hak dasar, dan membangun perdamaian dan keadilan. Hal ini melibatkan peningkatan kerja sama internasional, pemantauan pelaksanaan pemulihan, dan memperjuangkan prinsip-prinsip kemanusiaan di tingkat global (IFRC, 2017).

Diplomasi kemanusiaan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan melalui dialog, negosiasi, kerja sama, dan advokasi. Hal ini dapat melibatkan penyusunan kebijakan, perundingan perjanjian, penggalangan dana, pengiriman bantuan kemanusiaan, perlindungan korban bencana, dan upaya pemulihan pasca bencana (Minear dan Smith, 2007).

Dalam buku Larry Minear dan Hazel Smith yang berjudul *Humanitarian Diplomacy: Practitioner and Their Craft*, menjelaskan Diplomasi Kemanusiaan sebagai usaha yang dilakukan oleh aktor, baik negara maupun non-negara, untuk memperoleh akses kepada masyarakat yang terkena dampak krisis di suatu negara. Tujuan utama Diplomasi Kemanusiaan adalah memberikan aktor kemanusiaan kesempatan untuk beroperasi di tengah-tengah krisis, dengan menggunakan pendekatan diplomatik guna memperoleh dukungan yang diperlukan (Minear dan Smith, 2007).

Larry Minear dan Hazel Smith mengkategorikan aktivitas dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Mobilisasi kehadiran organisasi kemanusiaan di negara yang membutuhkan.

Aktor kemanusiaan hadir dan melaksanakan tindakan kemanusiaan dalam wilayah yang sedang menghadapi peristiwa tertentu, seperti konflik atau bencana alam.

2. Mengadakan negosiasi untuk memperoleh izin memberikan bantuan kepada warga sipil.

Aktor kemanusiaan berupaya melakukan negosiasi dengan pihak berkepentingan guna memperoleh izin untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga sipil.

3. Memantau program bantuan.

Aktor kemanusiaan mengawasi pelaksanaan program bantuan, serta memberikan laporan mengenai bantuan yang telah disediakan.

Keberhasilan diplomasi kemanusiaan dapat dinilai melalui tindakan kemanusiaan yang diimplementasikan oleh aktor kemanusiaan, serta pembentukan kerja sama dalam isu-isu kemanusiaan. Berdasarkan aktivitas diplomasi kemanusiaan dari Minear dan Smith, penulis menggunakan teori ini untuk melihat upaya eksternal Pemerintah India dalam melakukan langkah diplomatik, guna mendapatkan bantuan tambahan penanganan banjir di Kerala.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang mana penulis menjabarkan data-data secara lebih rinci, dengan mendeskripsikan upaya eksternal yang dilakukan Pemerintah India dalam menangani banjir di Kerala pada tahun 2018. Jenis data menggunakan data sekunder yang mana data diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, laporan, dan website resmi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan informasi yang telah dipublikasikan secara umum dan relevan melalui jurnal, buku-buku, artikel, situs internet, berbagai publikasi lainnya serta dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 2014). Analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai dirasa cukup, dengan cara reduksi data, lalu display data, dan gambaran konklusi atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Eksternal

Mengetahui masih banyaknya tantangan dan masalah yang harus ditangani dan ketidakmampuan Pemerintah India dalam mengatasi dampak banjir hanya melalui upaya domestik, Pemerintah India memerlukan upaya lain dengan mulai melakukan langkah persuasif menggunakan diplomasi kemanusiaan. Langkah yang dilakukan India terwujud dalam beberapa upaya berikut:

1. Menegosiasikan Bantuan Melalui Panggilan Telepon dengan Uni Emirat Arab

Dalam praktiknya, ketua menteri negara bagian Kerala yaitu Pinayari Vijayan meminta bantuan Uni Emirat Arab pada 21 Agustus 2018. Dialog antara ketua menteri dan pemimpin Uni Emirat Arab dilakukan melalui panggilan telepon, dan memberikan hasil berupa bantuan sebesar US\$ 100 juta yang dijanjikan Uni Emirat Arab untuk membantu korban bencana di Kerala (*The Guardian*, 2018).

Kendati demikian, pada akhirnya Narendra Modi selaku Perdana Menteri India memilih untuk menolak bantuan dari UEA. Keputusan Narendra Modi untuk menolak bantuan asing dalam beberapa kejadian bencana dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kebijakan dalam konteks hubungan luar negeri dan pertimbangan politik internal. (*Kamarajias Academy*, 2018). Narendra Modi selaku Perdana Menteri tetap mengapresiasi tawaran yang datang dalam cuitan twitter pribadinya.

Gambar 2. Cuitan Twitter oleh Narendra Modi selaku PM India sebagai Bentuk Apresiasi terhadap Bantuan UEA



Sumber : Twitter

Walaupun menolak bantuan dari negara lain, Pemerintah India tetap menerima bantuan program dari organisasi internasional, hal ini dikarenakan India ikut dalam keanggotaan organisasi internasional tersebut sehingga dapat ikut berkontribusi dan memantau program bantuan yang diberikan, agar terdapat pembelajaran untuk melakukan evaluasi tentang penanganan banjir sesuai dengan *National Disaster Management Plan India* dan aktivitas diplomasi kemanusiaan (NDMP, 2016).

2. Menegosiasikan Akses Bantuan kepada PBB di Jenewa

Selain berdialog dengan pemimpin Uni Emirat Arab, dalam menegosiasikan akses bantuan, Pemerintah India juga melakukan kunjungan ke Jenewa. Kunjungan ini diwakili oleh Pemimpin Kongres dan Anggota Parlemen Thiruvananthapuram, Shashi Tharoor, di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018. Dalam pernyataan yang dikeluarkan, kantornya menyatakan: "Dr. Tharoor melakukan perjalanan sebagai Anggota Parlemen dari Kerala dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB, dengan pengalaman 29 tahun di organisasi tersebut dan jaringan kontak yang luas dalam komunitas kemanusiaan internasional. Jangkauan ini terutama karena tanggung jawab moral yang dirasakannya sebagai orang Kerala untuk mengeksplorasi kemungkinan bantuan internasional dan dukungan untuk mengurangi penderitaan sesama orang Kerala, dan menyampaikan rekomendasi ini kepada Pemerintah negara bagian dan Pemerintah pusat." (*The Indian Express*, 2018).

Tharoor mengatakan bahwa akan menginformasikan kepada Ketua Menteri Kerala, Pinayari Vijayan terkait manfaat dari diskusi-diskusi tersebut, sifat dan tujuan mereka, serta area-area spesifik yang menjadi prioritas bagi Kepala Menteri. Tharoor juga menyatakan bahwa ia menulis kepada Ketua Menteri Kerala, Pinayari Vijayan mengenai kesan-kesan yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga PBB di Jenewa dan kemungkinan tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian, jika diperlukan. Pemerintah India juga dapat mengevaluasi apakah diperlukan penilaian kebutuhan multi-sektor oleh lembaga-lembaga PBB seperti WHO, UNICEF, UNDP, FAO dan lainnya (*The Indian Express*, 2018). Dalam kunjungan tersebut, Kerala dapat meminta dan menerima bantuan dari PBB rekonstruksi untuk membangun kembali Kerala dan bekerja sama dengan sistem PBB sehingga bantuan internasional yang signifikan dalam rekonstruksi dapat difasilitasi.

Gambar 3. Kunjungan oleh Shashi Tharoor di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa



Sumber : *The Indian Express*

Kunjungan Shashi Tharoor di Jenewa, kemudian membuka jalan baru bagi India untuk menerima bantuan organisasi kemanusiaan di dunia. Pemerintah India

mengerahkan kehadiran organisasi kemanusiaan di negaranya dengan meminta dukungan lebih lanjut dari PBB. Respons yang diberikan oleh PBB, terutama UNICEF, merupakan bagian dari keterlibatan mereka yang lebih luas di Kerala, meliputi penanganan situasi-situasi umum dalam konteks bantuan kemanusiaan (UNICEF, 2019).

Organisasi internasional yang berpartisipasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada India, seperti Gabungan beberapa organisasi internasional yang berafiliasi dan berada di bawah naungan PBB melakukan program *Post-Disaster Needs Assessments* (PDNA) yang didanai oleh *Central Emergency Response Fund* (CERF) dan bekerja sama dengan pemimpin Kerala untuk melakukan kajian kebutuhan pasca bencana yang bertujuan untuk menilai kerusakan, kehilangan, dan kebutuhan pemulihan di sektor-sektor utama yang terkena dampak bencana. Diantaranya ada *World Health Organizations* (WHO), Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau *Food and Agriculture Organizations* (FAO). Selain itu, Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam program *Building Back Better: Kerala Addressing Post-Disaster Recovery Needs* yang berfokus pada dukungan dan layanan *Water Sanitation and Hygiene* (WASH), dan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang ikut andil dalam keterlibatan penanganan banjir di Kerala (NIDM, 2020).

Organisasi di bawah PBB yang didanai oleh CERF telah menerima alokasi dana sebesar US\$ 4,98 juta untuk respons darurat yang cepat guna menyediakan bantuan penyelamatan jiwa bagi orang-orang yang terdampak banjir Kerala pada tahun 2018. Dana ini memungkinkan badan-badan dan mitra PBB untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa di bidang tempat tinggal, mata pencaharian, sektor kesehatan, dan WASH (UN CERF, 2018).

CERF juga mendukung operasionalisasi mekanisme *Accountability to Affected Population* (AAP) untuk pertama kalinya di India, yang terintegrasi dalam *Local Self-Government Department* (LSGD) dan dipimpin oleh Kudumbashree, yaitu sebuah jaringan kelompok swadaya perempuan di Kerala yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan pembangunan lokal di tingkat desa. Kudumbashree memiliki peran penting dalam menggerakkan program-program pembangunan sosial dan ekonomi di Kerala. Dengan sistem ini memungkinkan pengumpulan suara dan masukan dari 19.689 orang yang terdampak untuk meningkatkan tindakan pemulihan dan perencanaan pembangunan (UN CERF, 2018).

Secara lebih rinci, berikut merupakan hasil bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional yang sudah dilakukan melalui berbagai macam program antara lain:

1. Program Mata Pencaharian

Kegiatan FAO yang didanai CERF memastikan tidak ada wabah penyakit ternak dan unggas, memberikan bantuan vitamin dan mineral untuk ternak, serta pembersihan lahan pertanian. UNDP membantu 8.525 orang yang terdampak banjir dalam pemulihan mata pencaharian mereka, termasuk penyediaan hari kerja bagi petani dan dukungan usaha kecil.

2. Program Perumahan

UNDP membantu 7.300 penerima bantuan dengan melakukan perbaikan darurat pada rumah mereka, mendirikan 10 pusat penampungan, memberikan bantuan teknis di lokasi kepada 3.597 pemilik rumah yang terkena dampak banjir, serta melatih 1.241 tukang batu, juga memberikan panduan kepada 221 pemilik rumah, 60 kontraktor, dan

373 mahasiswa diploma teknik sipil dalam praktik konstruksi yang tahan bencana dan berkelanjutan.

3. Program Kesehatan

UNICEF dan WHO membantu Departemen Kesehatan di 8 kabupaten yang paling terdampak banjir dengan menamamambah 349 tenaga medis, serta tambahan peralatan kesehatan lainnya. Selain itu, UNICEF dan WHO juga memperkuat pengawasan penyakit, akses kesehatan, serta menyediakan peralatan diagnostik penyakit yang rawan terjadi akibat banjir seperti 700 peralatan diagnostik penyakit Kolera dan peralatan diagnostik 5.100 leptospirosis, serta pemberian 40 kapsul Doxycycline Profilaksis untuk pencegahan leptospirosis. WHO juga mendukung peningkatan akses layanan kesehatan di 313 fasilitas kesehatan yang tersebar di Kerala, serta mendirikan 20 tenda darurat untuk klinik pemeriksaan kesehatan. Selain itu, program peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental orang yang terdampak dilaksanakan di tingkat distrik dan blok untuk memperkuat program dukungan psiko-sosial yang sedang berjalan dari Pemerintah Kerala.

Selain itu, program ini mendukung pengembangan pedoman dan protokol WASH untuk membersihkan, mendesinfeksi, dan merehabilitasi 1.120 sumur, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang WASH, menyediakan 170 unit pengolahan air, merehabilitasi 13 tangki septik, membersihkan 156 tangki dengan 675 pejabat Pemerintah Daerah yang fokus pada pemantauan kualitas air, dan pengelolaan tinja. Selain itu, mendirikan 2 instalasi pengolahan lumpur tinja di 2 kabupaten yaitu, Wayanad dan Pathanamthitta. Pada program ini, lebih dari 1 juta orang langsung terjangkau dengan akses air dan fasilitas sanitasi yang memadai.

Selama program-program ini berjalan, lebih dari 1,6 juta orang telah terjangkau melalui proyek-proyek yang didanai oleh CERF, melebihi target awal sebanyak 1,5 juta orang. Hal ini menunjukkan dampak positif dari bantuan yang telah diterima.

Pembahasan

Hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Larry Minear dan Hazel Smith. Mereka mengkategorikan aktivitas dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan ke dalam beberapa jenis, yaitu mobilisasi kehadiran organisasi kemanusiaan di negara yang membutuhkan, mengadakan negosiasi untuk memperoleh izin memberikan bantuan kepada warga sipil, dan memantau program bantuan. Teori ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis langkah-langkah diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam penanganan bencana banjir di Kerala.

Dalam diplomasi kemanusiaan, isu kemanusiaan tidak lagi menjadi masalah internal masing-masing negara, melainkan perlunya bentuk kerja sama global untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan, seperti masalah bencana alam yang bisa terjadi di manapun dan kapanpun. Itulah sebabnya diplomasi kemanusiaan menjadi bagian yang semakin penting dalam agenda diplomasi internasional. Dalam praktiknya, diplomasi kemanusiaan dapat dilakukan melalui upaya untuk membujuk para pemimpin dan pembuat keputusan agar melindungi hak asasi manusia dan memberikan bantuan kemanusiaan akibat bencana (IFRC, 2017).

Dalam upaya untuk mendapatkan bantuan, Pemerintah India mengerahkan kehadiran organisasi kemanusiaan di negaranya dengan meminta dukungan dari PBB. Respons yang diberikan oleh PBB, terutama UNICEF, merupakan bagian dari keterlibatan mereka yang lebih luas di Kerala, meliputi penanganan situasi-situasi umum dalam konteks bantuan kemanusiaan (UNICEF, 2019). Selain Pemerintah India,

dalam melakukan upaya eksternal juga melibatkan pemerintah lokal Kerala. Dalam praktiknya, ketua menteri negara bagian Kerala yaitu Pinayari Vijayan meminta bantuan Uni Emirat Arab pada 21 Agustus 2018. Dialog antara ketua menteri dan pemimpin Uni Emirat Arab dilakukan melalui panggilan telepon, dan memberikan hasil berupa bantuan sebesar US\$ 100 juta yang dijanjikan Uni Emirat Arab untuk membantu korban bencana di Kerala (*The Guardian*, 2018).

Kendati demikian, pada akhirnya Narendra Modi selaku Perdana Menteri India memilih untuk menolak bantuan dari UEA. Keputusan Narendra Modi untuk menolak bantuan asing dalam beberapa kejadian bencana dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kebijakan dalam konteks hubungan luar negeri dan pertimbangan politik internal. Modi mempertimbangkan hubungan India dengan negara-negara lain ketika menolak bantuan asing. Penolakan bantuan asing dapat menjadi bagian dari strategi diplomasi India untuk menunjukkan kemandirian dan kemampuan negara dalam mengatasi bencana tanpa ketergantungan pada bantuan negara lain. Selain itu, secara politis, penolakan bantuan asing juga dipengaruhi oleh pertimbangan dalam konteks politik internal India. Modi ingin menunjukkan kepada rakyat India bahwa pemerintahannya dapat menangani bencana tanpa bergantung pada bantuan dari negara lain. Dalam kedua pertimbangan ini, keputusan Modi untuk menolak bantuan asing dapat dipandang sebagai langkah untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian India dalam menangani bencana serta sebagai pesan politik kepada masyarakat India dan dunia internasional (*Kamarajias Academy*, 2018).

Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada bulan Desember 2004 setelah tsunami Samudra Hindia oleh Perdana Menteri Manmohan Singh. Sebelumnya, India telah menerima bantuan dari luar negeri untuk bencana seperti gempa bumi di Uttarkashi tahun 1991, gempa bumi di Latur tahun 1993, gempa bumi di Gujarat tahun 2001, siklon di Bengal tahun 2002, dan banjir di Bihar tahun Juli 2004. Namun, saat terjadi banjir bandang di Uttarakhand pada tahun 2013 yang menyebabkan kerugian besar, pemerintah menolak menerima bantuan dari luar negeri dan begitu pula kebijakan penerimaan bantuan saat banjir Kerala tahun 2018.

Pemerintah lokal Kerala dalam upaya diplomasi kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan adalah langkah yang penting dan strategis. Melibatkan pemerintah lokal dalam proses diplomasi memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat India dan pemerintah daerah Kerala dalam mengatasi bencana dan memperoleh dukungan internasional. Dengan melibatkan pemerintah lokal, terutama dalam konteks bencana alam seperti banjir di Kerala yang sering terjadi setiap tahunnya, dapat menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani situasi darurat. Selain itu, melibatkan pemerintah lokal juga memungkinkan untuk mendapatkan informasi dan perspektif yang lebih mendalam tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, sehingga bantuan yang diterima dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat India dan pemerintah lokal Kerala dalam diplomasi kemanusiaan, dapat memperkuat citra bersatu dan fokus bersama dalam menghadapi bencana serta memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dalam skala nasional maupun internasional. Ini juga menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan respons yang efektif terhadap situasi krisis dan merumuskan langkah-langkah pemulihan yang terkoordinasi.

Pemerintah India dan pemerintah lokal Kerala yang bekerjasama telah berhasil menjalankan serangkaian langkah diplomasi kemanusiaan yang efektif dalam

menangani bencana banjir di Kerala, termasuk menegosiasikan bantuan dengan Uni Emirat Arab melalui panggilan telepon, serta memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai organisasi internasional melalui kunjungan ke PBB di Jenewa. Langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah India mencerminkan implementasi dari teori ini, dengan berhasilnya mobilisasi bantuan internasional dan pendekatan negosiasi yang efektif.

Respons global terhadap upaya diplomasi kemanusiaan Pemerintah India di Kerala, terutama dukungan dan keterlibatan organisasi internasional seperti UNICEF, WHO, FAO, dan UNDP, menunjukkan solidaritas dan kerja sama lintas negara yang krusial dalam menanggapi bencana alam skala besar. *Program post-Disaster Needs Assessments* (PDNA) yang diinisiasi dan didukung oleh berbagai lembaga internasional, dengan dukungan CERF, menjadi strategi evaluasi yang cermat dalam mengidentifikasi kerusakan, kehilangan, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana banjir di Kerala.

Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa diplomasi kemanusiaan yang diterapkan oleh Pemerintah India dalam bencana banjir di Kerala tidak hanya berhasil dalam memperoleh bantuan dan dukungan yang substansial dari berbagai pihak, tetapi juga mencerminkan pentingnya kerja sama global dalam menanggulangi bencana alam secara efektif. Langkah-langkah diplomasi yang terstruktur dan terencana dengan baik oleh Pemerintah India memberikan contoh nyata dari kebutuhan akan upaya koordinasi dan solidaritas internasional dalam merespons dan mengatasi dampak bencana alam yang mengancam kemanusiaan.

Kesimpulan

Banjir akibat musim hujan muson pada tahun 2018 di Kerala, India, berdampak pada 5,4 juta penduduk, menewaskan 399 orang dan memaksa 1,4 juta orang mengungsi. Banjir ini merusak infrastruktur, termasuk perumahan, transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan sektor irigasi, serta menimbulkan kerugian ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam mengatasi banjir di Kerala masih memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan dalam mencapai desa-desa yang terisolasi, kesulitan dalam evakuasi korban, dan keterbatasan anggaran. Kekurangan-kekurangan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India masih perlu ditingkatkan sehingga Pemerintah perlu membuka diri dan menerima bantuan kemanusiaan dari pihak luar. Selain itu, hubungan diplomatis dengan negara-negara lain dan organisasi internasional juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah India agar mendapatkan bantuan adalah melakukan langkah persuasif dengan menggunakan diplomasi kemanusiaan. Dalam diplomasi kemanusiaan, isu kemanusiaan tidak lagi menjadi masalah internal masing-masing negara, melainkan menjadi kerja sama global untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan, seperti masalah bencana alam yang bisa terjadi di manapun dan kapanpun. Itulah sebabnya diplomasi kemanusiaan menjadi bagian yang semakin penting dalam agenda diplomasi internasional. Dalam praktiknya, diplomasi kemanusiaan dapat dilakukan melalui upaya untuk membujuk para pemimpin dan pembuat keputusan agar melindungi hak asasi manusia dan memberikan bantuan kemanusiaan.

Dalam penelitian ini, upaya India dalam menjalankan aktivitas diplomasi kemanusiaan adalah mengerahkan kehadiran organisasi kemanusiaan dalam negaranya, menegosiasikan akses bantuan kepada penduduk sipil, dan memonitor bantuan program.

Langkah yang dilakukan India terwujud dalam beberapa upaya, seperti melakukan panggilan telepon dengan pemimpin negara, mengunjungi kantor PBB di Jenewa, dan meminta bantuan langsung terhadap badan-badan yang berkapabilitas dalam menangani banjir. Melalui upaya ini, Pemerintah India mendapatkan hasil positif dari aktor kemanusiaan global. Hal ini dibuktikan dari bantuan yang masuk baik dari negara-negara, maupun organisasi internasional.

Daftar Pustaka

- Agung. “*Merespon bencana dengan diplomasi kemanusiaan*”, UGM, 24 Oktober 2013, Tersedia di <https://ugm.ac.id/id/berita/8343-merespon-bencana-dengan-diplomasi-kemanusiaan>. Diakses pada 22 Juni 2023
- Baynes, Chris. “*Worst floods in nearly a century kill 44 in India’s Kerala state amid torrential monsoon rain*”, INDEPENDENT, 15 Agustus 2018, Tersedia di <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/india-worst-floods-flooding-death-monsoon-rain-dead-kerala-kochi-a8493011.html>. Diakses pada 12 Februari 2023.
- BBC News. “*Kerala Floods: Monsoon waters kill hundreds in Indian state*”, BBC, 17 Agustus 2018, Tersedia di <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45216671>. Diakses pada 11 Februari 2023.
- DetikNews, “*Dilanda Banjir, India Tolak Bantuan Rp 1,4 T dari Uni Emirat Arab*”, Novi Christiastuti, 23 Agustus 2018, tersedia di <https://news.detik.com/internasional/d-4178538/dilanda-banjir-india-tolak-bantuan-rp-14-t-dari-uni-emirat-arab>. diakses pada 20 oktober 2023.
- Devasia, Jose. “*Focus shifts to rescues as rain abates in flood-hit Kerala*”, REUTERS, 18 Agustus 2018, Tersedia di <https://www.reuters.com/article/india-floods-idINKBN1L309P>. Diakses pada 13 Februari 2023.
- Government of India. 2016. *National Disaster Managemet Plan*. New Delhi: A Publication of the National Disaster Management Authority.
- Government of India. *Study Report Kerala Floods of August 2018*. Tersedia di <https://reliefweb.int/report/india/study-report-kerala-floods-august-2018-september-2018> diakses pada 9 Februari 2023.
- IFRC. *Humanitarian Diplomacy Policy*. Tersedia di <https://www.ifrc.org/document/humanitarian-diplomacy-policy> diakses pada 22 Juni 2023.
- India Meteorological Department Ministry Of Earth Sciences Government Of India. Tersedia di <https://mausam.imd.gov.in/> diakses pada 22 Januari 2024.
- Kamaraj Ias Academy, “*Why India Refuses Foreign Aid for Kerala Floods?*”, <https://www.kamarajiasacademy.com/blog/why-india-refuses-foreign-aid-for-kerala-floods>. Diakses pada 7 Mei 2024.
- Kerala State Biodiversity Board. 2018. *Impact of Flood/Landslides on Biodiversity*.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Minear, Larry dan Hazel Smith. 2007. *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft*. India: United Nations University Press.

- OCHA. *Flood Relief Operation by Indian Army in Kerala (17 Aug 2018)*. Tersedia di <https://reliefweb.int/report/india/flood-relief-operation-indian-army-kerala-17-aug-2018> diakses pada 27 Februari 2023.
- OCHA. India: *Floods Nov – 2018*. Tersedia di <https://reliefweb.int/disaster/tc-2018-000413-ind> diakses pada 7 Maret 2023.
- Rajiv Gandhi Institute of Development Studies. 2018. *A Report on Kerala Flood 2018 The Disaster of Century*.
- The Economics Times. “*European Union to help in Kerala flood relief through Red Cross*”, Dipanjan Roy Chaudhury, 25 Agustus 2018, tersedia di <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/european-union-to-help-in-kerala-flood-relief-through-redcross/articleshow/65538493.cms>. diakses pada 20 oktober 2023.
- The Guardian. “*Kerala: More Than 1M People Flee to Relief Camps to Escape Floods*”, 21 Agustus 2018, Tersedia di <https://www.theguardian.com/world/2018/aug/21/kerala-india-more-than-1m-people-flee-to-relief-camps-to-escape-floods>. diakses pada 21 Oktober 2023.
- The Indian Express. “*Kerala floods: Discussed UN visit with CM Vijayan, have passed on recommendations, says Shashi Tharoor*”, 22 Agustus 2018, Tersedia di <https://indianexpress.com/article/india/kerala-floods-cm-pinarayi-vijayan-says-shashi-tharoor-not-states-emissary-he-says-went-in-personal-capacity-5319027/lite/>. diakses pada 24 Oktober 2023.
- The President’s Office Republic of Maldives. *The Government of Maldives decides to donate to relief efforts in flood-hit state of Kerala* diakses pada 20 oktober 2023.
- UNCERF. 2018. *Resident/Humanitarian Coordinator Report On The Use Of CERF Funds India Rapid Response Flood 2018*.
- UNICEF. 2019. *India Consolidated Emergency Report 2018*.
- UNICEF. *Building Back Better: Kerala adressing Post-Disaster Recovery Needs*.
- United Nations Development Programme. *Kerala Post Disaster Needs Assessment Floods and Landslides - August 2018*.
- US Dept of Commerce. *What is the Moonsoon?*. Tersedia di <https://www.weather.gov/twc/MonsoonInfo> diakses pada 9 Februari 2023.
- Waliala, A., & Nusrat, N. 2020. *Kerala Floods 2018. National Institute of Disaster Management*.
- WASH: “*Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India*”. FOIR 1 (2) 341-378